

**Analisis Agresivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan terhadap
Keamanan Regional Asia Tenggara
(Studi Kasus: Negara-negara Asia Tenggara Pengklaim Laut China Selatan)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional*

Disusun oleh:

A. Muhammad Fadhil Pramadiansyah (E061181520)

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS AGRESIVITAS REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
DI LAUT CHINA SELATAN TERHADAP KEAMANAN
REGIONAL ASIA TENGGARA (STUDI KASUS: NEGARA-
NEGARA ASIA TENGGARA PENGKLAIM LAUT CHINA
SELATAN)

N A M A : A. MUH. FADHIL PRAMADIANSYAH

N I M : E061181520

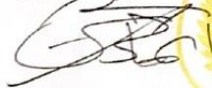
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 12 Agustus 2022

Mengetahui :

Pembimbing I,



Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,

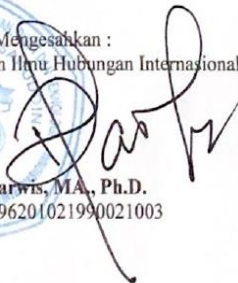


Bama Andika Putra, S.IP, MIR
NIK. 199112172018073001

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS AGRESIVITAS REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK
DI LAUT CHINA SELATAN TERHADAP KEAMANAN
REGIONAL ASIA TENGGARA (STUDI KASUS: NEGARA-
NEGARA ASIA TENGGARA PENGKLAIM LAUT CHINA
SELATAN)

N A M A : A. MUH. FADHIL PRAMADIANSYAH

N I M : E061181520

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 09
Agustus 2022.

TIMEVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

2. Bama Andika Putra, S.IP, MIR

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Muh. Fadhil Pramadiansyah

NIM : E061181520

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

Analisis Agresivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan terhadap Keamanan Regional Asia Tenggara (Studi Kasus: Negara-negara Asia Tenggara Pengklaim Laut China Selatan)

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar 12 Agustus 2022



A. Muh. Fadhil Pramadiansyah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat, taufiq, hidayah, ilmu, kekuatan, dan pengetahuan yang telah dilimpahkan sehingga tugas akhir yang berjudul “Analisis Agresivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan terhadap Keamanan Regional Asia Tenggara (Studi Kasus: Negara-negara Asia Tenggara Pengklaim Laut China Selatan)” dapat diselesaikan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dan lulus dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan Penulis sadar masih memiliki perjalanan yang panjang untuk terus menuntut ilmu dan mendidik diri terkait dengan topik yang dibahas. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif atas skripsi ini sangat diharapkan. Selain itu, proses pengerjaan skripsi yang cukup panjang ini juga telah melibatkan banyak pihak sehingga Penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, yaitu Ayahanda **A. Taswin Nur** dan Ibunda **Aida Ferawaty** serta seluruh keluarga besar Penulis yang selama ini telah mendidik, mendoakan, dan senantiasa mendukung Penulis selama ini, khususnya selama masa studi. Segala kebaikan, ketulusan, dan kasih sayang yang mereka telah berikan sehingga banyak hal positif yang Penulis semoga diberi balasan ganjaran yang besar oleh Allah SWT.

2. Dosen Pembimbing, Bapak **Agussalim, S.IP, MIRAP.,** dan Kak **Bama Andika Putra, S.IP., M.IR.,** terima kasih banyak telah membimbing dan memberikan banyak saran yang baik sehingga Penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Penulis karena dapat dibimbing oleh dua dosen yang sama-sama memiliki minat studi Hubungan Internasional yang cukup mirip dengan Penulis, terlebih lagi keduanya merupakan dosen favorit bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Semoga segala kebaikan dan keberkahan dilimpahkan oleh-Nya kepada kalian. Aamiin.
3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, Bapak **H. Darwis, M.A., Ph.D.,** yang telah banyak berjasa menjadikan departemen ini sebagai tempat untuk mengasah kemampuan *soft skills* dan *hard skills* serta sebagai tempat yang nyaman bagi para mahasiswanya sehingga banyak kenangan dan ilmu yang bermanfaat yang dapat kami dapatkan. Selain itu, ucapan terima kasih juga Penulis berikan kepada seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Bapak **Drs. Patrice Lumumba, M.A.,** Ibu **Seniwati, Ph.D.,** Bapak **Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.,** Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.,** Bapak **Drs. H. M. Imran Hanafi, MA., M.Ec.,** Bapak **Muhammad Nasir Badu, Ph.D.,** Bapak **Burhanuddin, S.IP., M.Si.,** Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., M.Si.,** Ibu **Pusparida Syahdan., S.Sos., M.Si.,** Kak **Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.,** Kak **Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., M.Si., MIR.,** dan Kak **Nurjannah Abdullah, S.IP., M.A.,** dan Kak **Biondi Sanda S.IP., M.Sc.,**

L.L.M. Penulis sangat berterima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan oleh seluruh tenaga pengajar, terlebih lagi beberapa di antara mereka cukup dekat dengan Penulis sehingga banyak pengalaman yang bisa Penulis dapatkan selama 8 semester ini. Di samping itu, tidak lupa ucapan terima kasih Penulis berikan kepada seluruh staf departemen, yaitu Ibu **Rahma**, Ibu **Tia**, Pak **Dayat**, Pak **Ridho**, dan Kak **Ita**, yang telah banyak membantu dan sangat baik dalam melayani segala kebutuhan akademik dan non-akademik Penulis. Semoga kalian semua senantiasa dilimpahi kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas di departemen ini.

4. *My partner in everything and my research colleague*, **Chantika Salsabila Alarsah**. Segala kebaikan, dukungan, do'a, perhatian, dan ketulusan dalam membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sangat layak mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya. *Thank you for always having my back, your support means the world. Knowing you is such a blessing, God knows how kind you are.* Semangat untuk sisa masa studi dan penyelesaian skripsinya, semoga segala urusannya dimudahkan oleh-Nya, dan semangat untuk penelitiannya. *I wish nothing but the best for our future holds! Cheers to Chesa.*
5. Ayah **Arief** dan Mama **Ida** sekeluarga, terima kasih banyak atas segala dukungan, do'a, dan kasih sayang yang dicurahkan bagi Penulis sejak masa pengerjaan skripsi hingga seminar hasil skripsi. Kebaikan kalian sangat berarti bagi Penulis. Semoga kita semua dilimpahi rahmat dan ridho-Nya.

6. *My brother from another mother*, **Mario Kaishar Fahrevi**. Menjadi teman sekaligus saudara tidak sedarah sejak hari pertama menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin adalah suatu hal yang patut disyukuri, terlebih lagi berjuang bersama hingga titik akhir sebagai mahasiswa dengan segala dinamika birokrasi yang cukup banyak, namun senantiasa diberi jalan keluar oleh Yang Maha Kuasa, *alhamdulillah. We have shared our stories, feelings, and thoughts throughout the semesters, and not to mention our similar interests in IR field had completely fortified our ties as a friend unwittingly.* Selamat menentukan pilihan untuk perjalanan selanjutnya, semoga dimudahkan segala urusannya dan menjadi pribadi yang istiqomah.
7. *To my fellow Barrack Ohana* yang menjadi paguyuban pertama Penulis sejak menjadi mahasiswa HI, **Annisa Apriliani, Latifah Ukhra Rasyid, Indah Diantara, Mario Kaishar, Rahmat Riyadi, Hardian Novanto, Yudi Fauzan, Istiqomah Febrian, Aprilia Syani**. *I did not even know how the group name came up*, tapi terima kasih banyak karena kalian telah menemani Penulis sejak semester awal dalam mengarungi berbagai tempat nongkrong pada saat jam kosong kuliah dengan berbagai lelucon recehnya. Sehat selalu untuk kalian!
8. Teman-teman dekat Penulis selama masa perkuliahan, **Ayyub Alfaraz, Daffa Raynanda, Dhiya Fadhilah, Nurfalah Anbar, Yusril Ansari, Raisha Nadina, Putri Alifia, Sri Resky Mulyadi, Dewi Sukma**. Selain itu, teruntuk **Nur Afni Ramadhany** dan **Farah Zhahirah**, *you guys are a definition of a kind-hearted friends*, terima kasih karena telah menjadi teman

yang sangat baik bagi Penulis. Telah banyak kenangan yang membuat perkuliahan ini sangat berdinamika bersama kalian semua. *It was such an amazing journey with you guys throughout these years.*

9. Para mas-mas Reforma, Kang **Naswan Nasrun**, Mas **Alif Izha**, Om **Mario Kaishar**, Aa' **Hardian Novanto**, Bli **Diaz Tirtayasa**, Don **Daffa Raynanda**, Mr. **Ayyub Alfaraz**, dan Tuan Muda **As'ad Azhari**. *I do not know how to describe these people.* Intinya, semoga sukses dan sehat selalu.
#GGMU #JanganlupakeSenara
10. Teman-teman Reforma 2018, **Dinda Salsabila**, **Faqih Yusuf**, **Ryan Anggriawan**, **Faiq Qushayyi**, **Ahmad Salim**, **Alwan Ayyasy**, **Suci Puspa**, **Ahmad Azhar**, **Rani Palilu**, **Wingky Septiawanda**, **Rizky Amaliah**, **Al Fitrah Arysuci**, **Luthfania Andriani**, **Defki Sarma**, **Nurnaningsih Al-Hasmi**, **Nasya Quilim**, **Putri Nurul**, **Annisa Shafira**, **Merry Iktania**, **Munif Arif Ranti**, **Shafwan Mufadhal**, **Syahrin Janary**, dan yang Penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Penulis sangat bersyukur memiliki teman angkatan seperti kalian yang sangat baik, ramah, solid, dan berbakat. Semoga kalian senantiasa diberkahi Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dan kelancaran untuk studi dan dalam mencari dan di dalam dunia kerjanya.
11. Seluruh *foreign policy aficionados* FPCI Chapter Unhas. *God, I do not know where to start.* Disebabkan oleh keresahan membutuhkan sebuah wadah untuk menyalurkan minat riset dan menulis, khususnya untuk isu internasional, akhirnya inisiasi yang dilakukan oleh Penulis, **Annisa Apriliani**, **Indah Diantiara**, **Farah Zhahirah**, **Mario Kaishar**, **Nurul**

Hanuun, Nandito Oktaviano, Nur Iksan akhirnya dapat mengaktifkan kembali FPCI Chapter Unhas setelah *hiatus* beberapa tahun. Terima kasih banyak juga untuk seluruh pengurus yang telah banyak berkontribusi untuk membumikan isu-isu hubungan internasional bagi masyarakat.

12. Para senior HI (yang beberapa di antaranya seumuran dengan Penulis), yaitu

Fadil Aidhil, Cici Rindiani, Yusril Partang, Sayyidah Nisa, Alif Anshari, Ardela, Danu, Emil, Kak Ucup, Kak Rifki, Kak Syafrie, Kak Ryan, Kak

Echa, dan seluruh senior yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Terima kasih banyak karena telah ramah dan berbagi banyak pengetahuan selama ini. Suatu kebanggaan memiliki senior yang baik-baik dan mudah akrab kepada juniornya.

13. Presidium GenBI Komisariat Unhas dan seluruh pengurus GenBI Komisariat

Unhas, **Brenda Prisyella, Jamil Reza, Rizky Asfarada, Winda Winarta,**

Farah Zhahirah Whalyani, Latifah Ukhra, Muhammad Arnez, William

Desmond, Putri Kartika, Nandito Oktaviano, Betran Manulang, Rezky

Indah, dan seluruh pengurus yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Terima kasih banyak telah banyak berbagi pengalaman dan berbagai program kerja yang insya Allah bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas. GenBI, Energi untuk Negeri!

14. Para adik tingkat di Departemen Hubungan Internasional, **Daffa, Nadin,**

Kezia, Fira, Sofi, Iksan, Alif, Muflih, Junisya, Mega, dan untuk seluruh

adik tingkat yang tidak bisa saya tuliskan namanya satu per satu. Semoga kalian semua bisa menyelesaikan sisa masa studi di departemen ini dengan

baik, dan tentunya semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nilai yang baik pula. Selain itu, terkhusus untuk **Raihan Darwis**, terima kasih banyak karena telah sangat baik dan perhatian bagi para kakak tingkatnya dalam banyak hal. Semoga kalian semua sehat selalu.

15. Untuk Lavengerz, **Fadel Fachriansyah S.T.**, **Rezky Ramdhani S.T.**, **Letda Muhammad Ilham S.Tr.(Han)**., **Fuad Ar-Razaaq S.Tr.IP**, **drg. Rezky Ayu Pratiwi**, **Zhafirah Aughina S.T.**, dan **Qadriyyah Marzuqah S.T.** Terima kasih banyak telah menemani dan saling mendukung satu sama lain sejak SMA. Semoga dimudahkan segala urusannya dan sehat selalu.

Makassar, 22 Agustus 2022

A. Muh. Fadhil Pramadiansyah

ABSTRAKSI

Muh. Fadhil Pramadiansyah. 2018. E061181520. “Analisis Agresivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan terhadap Keamanan Regional Asia Tenggara (Studi Kasus: Negara-negara Asia Tenggara Pengklaim Laut China Selatan)”. Pembimbing I: Agussalim S. IP, MIRAP. Pembimbing II: Bama Andika Putra, S. IP., MIR. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan alasan agresivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan dan menjelaskan dampak agresivitas tersebut terhadap keamanan negara-negara Asia Tenggara yang mengklaim Laut China Selatan, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, di mana akan menjelaskan tujuan dari perilaku agresif dan instrumen-instrumen yang digunakan Tiongkok di Laut China Selatan serta dampak keamanan dari negara-negara pengklaim tersebut dengan menguraikan data primer dan sekunder yang relevan dengan pembahasan.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa alasan Tiongkok berperilaku agresif disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dengan menggunakan beberapa sarana yang mereka miliki, mulai dari instrumen yang bersifat demonstratif hingga ofensif. Hal tersebut pun memperlihatkan perilaku agresif Tiongkok tersebut berpengaruh terhadap beberapa negara pengklaim lainnya dengan merespon melalui kebijakan keamanan.

Kata Kunci: Laut China Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Agresivitas, Kebijakan Keamanan

ABSTRACT

Muh. Fadhil Pramadiansyah. 2018. E061181520. “Analysis of People’s Republic of China Aggressiveness in the South China Sea towards Southeast Asian Regional Security (Case Study: Southeast Asia Countries Claimants of the South China Sea). Advisor I: Agussalim, S. IP., MIRAP. Advisor II: Bama Andika Putra, S. IP, MIR. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Hasanuddin.

This study aims to explain the reasons for the People's Republic of China's aggressiveness in the South China Sea and the impact on the security of Southeast Asian countries that claim the South China Sea, namely the Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei Darussalam.

The research method used in this thesis is a qualitative descriptive-analytical method, which will explain the purpose of China's aggressive behavior and its instruments in the South China Sea, and the security impact of the other claimants by describing primary and secondary data relevant to this research.

This study finds that internal and external factors drove China's aggressive behavior by operating several means at their disposal, ranging from demonstrative to offensive mechanisms. China's aggressive behavior shows a security impact on several other claimant countries by responding to some security policies.

Keywords: The South China Sea, the People’s Republic of China, Aggressiveness, Security Policies

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	iii
Daftar Bagan	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	10
D. Kerangka Konseptual	11
1. Teori Strategis	12
2. Teori Sekuritisasi	17
3. Definisi Variabel Agresivitas	20
E. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Teknik Penelitian	29
3. Jenis Penelitian	29
4. Tahapan Penelitian	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Perilaku Agresif, Asertif, dan Koersif Tiongkok di Laut China Selatan	31
B. Sekuritisasi Negara-negara Asia Tenggara Pengklaim Laut China Selatan	37
BAB III GAMBARAN UMUM	44
A. Gambaran Umum Geografis Laut China Selatan	44
1. Kepulauan Spratly	47
2. Kepulauan Paracel	49
B. Sejarah Konflik di Laut China Selatan	51
C. Upaya Manajemen Konflik di Laut China Selatan	58

1. Proses Negosiasi Declaration of Conduct (DOC) hingga Code of Conduct (COC) Laut China Selatan	60
BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Analisis Penerapan Kebijakan Agresif Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan melalui Teori Strategis.....	68
1. Tujuan (<i>Ends</i>) Republik Rakyat Tiongkok menerapkan kebijakan agresif di Laut China Selatan	69
2. <i>Means</i> (Sarana) yang digunakan oleh Tiongkok dalam Mengimplementasikan Kebijakan Agresif di Laut China Selatan.....	84
B. Dampak Keamanan Negara-negara Asia Tenggara Pengklaim Laut China Selatan terhadap Agresivitas Republik Rakyat Tiongkok Di Laut China Selatan.....	97
1. Dampak terhadap Filipina	99
2. Dampak terhadap Vietnam.....	106
3. Dampak terhadap Malaysia.....	109
4. Dampak terhadap Brunei Darussalam	113
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	121
Daftar Pustaka	122

Daftar Bagan

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual.....	11
--	-----------

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kategori Perilaku Agresif Tiongkok pada Sengketa Maritim dan Wilayah Teritorial di Laut China Selatan.....	27
Tabel 4. 1 Data Perilaku Agresif Tiongkok terhadap Negara Pengklaim LCS Tahun 2013-2021.....	95
Tabel 4. 2 Bentuk-bentuk Perilaku Ofensif Tiongkok terhadap Negara Pengklaim Laut China Selatan	96

Daftar Gambar

Gambar 1.1 <i>Map Tracking China Coast Guard Haijing 3308 di Laut China Selatan (September 2018 – 2019)</i>	8
Gambar 3. 1 <i>The 1947 Location Map of the South China Sea Islands</i>	45
Gambar 3. 2 <i>Peta Laut China Selatan</i>	46
Gambar 3. 3 <i>Kepulauan Spratly</i>	48
Gambar 3. 4 <i>Kepulaun Paracel</i>	49
Gambar 4. 1 <i>Jalur Kapal Pengintai Amerika Serikat di Laut China Selatan tahun 2021</i>	81
Gambar 4. 2 <i>Peta Blok Minyak Bumi dan Gas Alam di Laut China Selatan</i>	83
Gambar 4. 3 <i>Durasi Pelayaran China Coast Guard di Laut China Selatan (Oktober 2018 – September 2019)</i>	87
Gambar 4. 4 <i>Lokasi Pembangunan Infrastruktur di Fiery Cross Reef</i>	91
Gambar 4. 5 <i>Outposts Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Spratly</i>	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut China Selatan merupakan salah satu perairan di Asia Tenggara yang memiliki permasalahan cukup kompleks atas konflik antar negara yang berada di sekitarnya selama bertahun-tahun. Kawasan ini menjadi area konflik disebabkan sengketa wilayah laut antara Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang masing-masing mengklaim wilayah yang berada di perairan tersebut. Padahal, faktanya setiap negara pengklaim tersebut telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Akan tetapi, klaim tumpang tindih atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan tersebut masih menjadi isu utama yang tidak memiliki progres baik (Putra, 2015). Hal tersebut juga tidak terlepas dari jumlah ratusan kepulauan yang ada di Laut China Selatan yang menjadi penyebab Tiongkok dan beberapa negara ASEAN saling mengklaim wilayah (Xu, 2014).

Sementara itu, menurut hasil survey ISEAS-Yusof Ishak Institute tahun 2021 yang berjudul *The State of Southeast Asia: 2021 Survey Report*, isu Laut China Selatan masih menjadi perhatian khusus bagi kawasan. Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa kehadiran Tiongkok di zona maritim negara lain serta militerisasi dan perilaku asertif Tiongkok di Laut China Selatan menjadi perhatian utama bagi negara-negara ASEAN (Seah et al. 2021). Selain itu, mekanisme *Code of Conduct* (COC) yang saat

ini dianggap paling layak sebagai manajemen sengketa di Laut China Selatan (Hu, 2021), nyatanya masih mengalami proses negosiasi yang tidak efektif. Tiongkok juga dianggap memanfaatkan mitra terdekatnya di Asia Tenggara, yaitu Laos dan Kamboja meredakan kritik negara ASEAN lainnya atas tindakan agresif Tiongkok di Laut China Selatan (Strangio, 2020). Oleh sebab itu, tensi di regional Asia Tenggara selama ini mengalami kondisi yang cenderung fluktuatif disebabkan oleh tindakan konfrontatif oleh masing-masing negara pengklaim di perairan ini. Salah satu faktor utamanya pun adalah klaim unilateral Tiongkok di Laut China Selatan.

Tiongkok telah lama melakukan klaim secara sepihaknya terhadap Laut China Selatan. Pada tahun 1947, di bawah kepemimpinan Partai Kuomintang, Tiongkok mengeluarkan peta yang memperlihatkan klaim teritorialnya di Laut China Selatan dengan indikator yang menandai teritorial mereka melalui *eleven-dash line* berdasarkan klaim historis. Peta tersebut menunjukkan bahwa cakupan klaim Tiongkok mencakup wilayah yang cukup luas, termasuk Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, serta Macclesfield Bank yang berhasil direbut dari Jepang pasca Perang Dunia II (Council on Foreign Relations, 2020). Akan tetapi, Tiongkok mengajukan peta Laut China Selatan yang baru kepada PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2009, di mana pada saat itu jumlah garis demarkasi yang sebelumnya berjumlah 11 garis putus-putus berkurang menjadi sembilan garis putus-putus, atau lebih dikenal dengan *nine-dash line*. Selain itu, klaim atas garis putus-putus menurut Dr. Wu Shicun (Presiden National Institute for South China Sea Studies) memiliki tiga elemen, yaitu kedaulatan atas seluruh fitur yang ada, hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan berdasarkan UNCLOS, dan hak historis atas penangkapan ikan, navigasi, dan pengembangan sumber

daya (Hayton dikutip dalam Zou dan Shicun, 2016). Hal tersebut pun pada akhirnya menjadi kontroversi sebab negara-negara ASEAN yang memiliki klaim atas wilayah ini, yaitu Vietnam, Brunei, Filipina, dan Malaysia menentang upaya Tiongkok tersebut (United Nations, 2011). Dengan demikian, hingga saat ini Tiongkok dan negara-negara ASEAN tersebut masih menghadapi permasalahan yang sama dan belum ada titik terang untuk menyelesaikan sengketa wilayah perairan ini.

Setiap negara ASEAN tersebut memiliki basis klaim yang variatif atas objek-objek di Laut China Selatan. Untuk Vietnam, basis klaim mereka terletak secara historis yang berdasarkan bahwa pendudukan mereka atas Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly setidaknya sebelum abad ke-17 dan bukti dari berbagai dokumen pendukung, seperti “*Route Maps from the Capital to the Four Directions*” tahun 1686, serta “*The Complete Map of the Unified Dai Nam*” tahun 1838. Selain itu, pada saat Vietnam dijajah oleh Perancis, kekuasaan administratif Paracels dipindahkan pada Juni 1932 ke Provinsi Thua Thien, dan Spratly digabungkan pada Desember 1933 dengan Provinsi Ba Ria dari Otoritas Cochinchine (The National Bureau of Asian Research (NBR), 2016). Sementara itu, Malaysia dan Brunei memiliki hak klaim atas beberapa pulau, karang, dan batuan di wilayah Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS 1982 (Roach, 2014; Uy & Espena, 2020). Adapun klaim Filipina atas objek-objek Laut China Selatan berdasarkan dari UNCLOS 1982, dan aktivitas angkatan bersenjata Filipina yang telah dilakukan pada tahun 1960-an di Scarborough Shoal sehingga dianggap telah menunjukkan niat untuk melaksanakan yurisdiksi di wilayah tersebut (Rosen, 2014).

Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa alasan sumber daya alam dan laut serta jalur strategis pelayaran di Laut China Selatan menjadi faktor yang menyebabkan masing-masing negara pengklaim tetap memperjuangkan wilayah perairan mereka. Menurut laporan U.S. Energy Information Agency (dikutip dalam Asia Maritime Transparency Initiative, 2018), diperkirakan terdapat sekitar 190 triliun kaki kubik gas alam dan 11 miliar barel minyak bumi di Laut China Selatan. Selain itu, perairan ini juga menjadi tempat bagi sekitar 3,365 spesies ikan dan merupakan salah satu area penangkapan ikan yang paling produktif dalam hal produksi laut tahunan (Gnanasagaran, 2018). Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa kawasan ini sangat kaya terhadap sumber daya alam dan lautnya. Ditambah lagi, Laut China Selatan menyumbangkan hasil tangkapan ikan untuk dunia sebesar 12% (Gnanasagaran, 2018). Di samping itu juga, kawasan ini menjadi sangat strategis sebab rata-rata pelayaran yang ada di sana lebih sibuk dibandingkan dengan pelayaran di Terusan Suez dan di Terusan Panama (Kaplan dikutip dalam Darmawan & Mahendra, 2018). Nilai perdagangan global di kawasan ini pada tahun 2016 pun mencapai US\$3.37 triliun, di mana pada tahun yang sama ekspor Tiongkok melalui area ini mencapai angka US\$874 miliar atau sekitar 26% dari perdagangan dunia yang melalui Laut China Selatan (China Power Project, 2021). Dengan demikian, secara geo-ekonomi, Tiongkok dan negara pengklaim lainnya memiliki kepentingan yang cukup besar pada perairan ini dalam keuntungan sumber daya alam dan melakukan perdagangan global.

Kepentingan Tiongkok di Laut China Selatan sendiri tidak terlepas dari klaim historis mereka pada perairan ini. Tiongkok yang sejak dahulu telah menjadi salah satu kekuatan dunia telah banyak melakukan eksplorasi. Hal tersebut pun juga dilakukan

terhadap dua kepulauan besar yang saat ini menjadi sengketa, yaitu Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Tiongkok mengklaim bahwa mereka telah memanfaatkan kedua kepulauan tersebut sejak abad ke-2 SM dengan tujuan untuk kepentingan rakyat Tiongkok dalam hal perekonomian, militer, serta ilmu pengetahuan (Dam dikutip dalam Darmawan, 2018). Hal tersebut juga dapat dilihat melalui kekuatan angkatan laut yang sangat kuat pada abad ke-15 saat Laksamana Zheng He membangun armada kapal perang besar (Zou, 2021).

Sejak Pemerintah Tiongkok mempublikasikan peta 11 garis putus-putus pada tahun 1947, tidak ada sama sekali protes secara resmi yang dilayangkan oleh negara-negara yang berada di sekitar Laut China Selatan. Secara tidak langsung, Tiongkok telah menegaskan klaim mereka atas seluruh perairan ini, baik itu atas wilayah teritorial maupun sumber daya alamnya. Akan tetapi, saat negara-negara lain menyadari potensi sumber daya alam yang melimpah di perairan tersebut dan saat negara lain menduduki kepulauan atau fitur yang berada di perairan tersebut Tiongkok mulai memperlihatkan perilaku agresifnya. Tiongkok mulai melakukan tindakan agresifnya di kawasan ini sejak 1974 dengan menduduki bagian barat Kepulauan Paracel. Pasukan Tiongkok pada saat itu merebut garnisun Vietnam Selatan dan menancapkan bendera di beberapa pulau (Council on Foreign Relations, 2020). Selain itu, pada tahun 1988, Tiongkok dan Vietnam kembali mengalami konflik mematikan di Johnson Reef yang berada di Kepulauan Spratly. Angkatan Laut Tiongkok pada saat itu menenggelamkan tiga kapal Vietnam serta menewaskan 74 awak kapal Vietnam (BBC Monitoring, 2019). Hal tersebut menunjukkan tindakan tegas Tiongkok di Laut China Selatan sehingga terjadi bentrokan militer antar negara di kawasan ini yang menyebabkan kerugian materil.

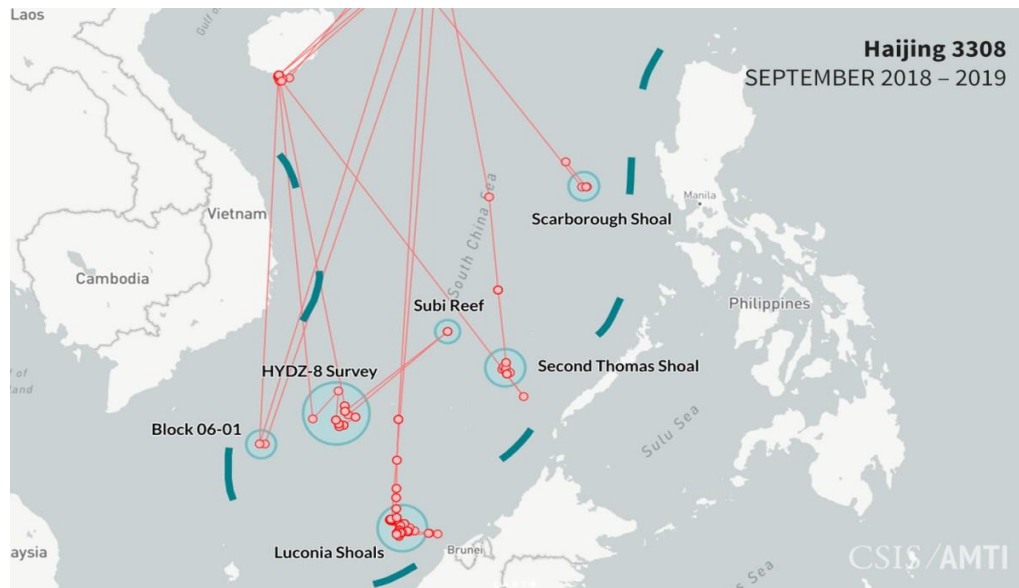
Faktor lain yang menyebabkan perilaku agresif Tiongkok dapat ditinjau dari alasan hak kedaulatan dan berdaulat mereka atas seluruh perairan ini.

Meskipun demikian, Tiongkok juga melakukan strategi melalui pendekatan kerja sama dan ekonomi dengan negara pengklaim Laut China Selatan untuk menurunkan tensi atas sengketa tersebut. Menurut Qi (2019), Tiongkok memiliki insentif ekonomi dan strategi dalam rangka mencapai kepentingan domestik dan menjadi kekuatan maritim yang sangat kuat. Hal tersebut dapat dilihat melalui perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN pada tahun 2016 mencapai US\$452 miliar, lebih baik dibandingkan nilai perdagangan Tiongkok-Jepang (US\$264 juta) (Suehiro, 2017). Sementara itu, nilai total perdagangan barang Tiongkok-ASEAN pada tahun 2020 meningkat menjadi US\$684.6 miliar (Chinese Ministry of Foreign Affairs, 2021). Akan tetapi, berbagai contoh upaya untuk mencapai kepentingan Tiongkok tersebut masih memiliki hambatan sebab relasi dengan negara-negara pengklaim masih sering menemui hambatan atas tindakan konfrontatif Tiongkok itu sendiri di wilayah maritim negara lain.

Akan tetapi, hingga saat ini pun Tiongkok masih terus memperlihatkan agresivitasnya di Laut China Selatan. Menurut Mastro (2020), sejak 2009 Tiongkok telah menegaskan klaimnya di Laut China Selatan melalui perebutan kembali lahan, militerisasi pada pulau-pulau yang telah mereka ambil alih, dan menggunakan argumen legal serta pengaruh diplomatis tanpa menciptakan konfrontasi dengan pihak internal regional maupun pihak eksternal. Bahkan, terhitung sejak 2013 Tiongkok juga telah membangun lebih dari 3,000 hektar lahan reklamasi pada tujuh fitur yang ada di perairan ini dengan melakukan infrastrukturisasi untuk membuat fasilitas pelabuhan, landasan

pacu, bunker untuk penyimpanan bahan bakar dan senjata, serta sensor array jarak jauh (Asia Maritime Transparency Initiative dikutip dalam Stashwick, 2019). Selain itu, Tiongkok juga dilaporkan telah memasang senjata darat Angkatan Laut mereka pada empat *outposts* di Kepulauan Spratly sejak 2016 (U.S. Department of Defense, 2017). Militerisasi tersebut hingga saat ini juga telah menghasilkan 20 *outposts* di Kepulauan Paracel dan tujuh *outposts* di Kepulauan Spratly (Council on Foreign Relations, 2021). Oleh sebab itu, segala upaya yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut semakin memperjelas kehadiran mereka atas klaim sepihak di kawasan ini melalui kehadiran militer mereka.

Selain dari reklamasi pulau yang diikuti dengan militerisasi pada wilayah yang menjadi sengketa, Tiongkok juga memperlihatkan tindakan agresifnya terhadap negara-negara pengklaim lainnya melalui armada laut mereka. Insiden antara kapal Tiongkok dan kapal negara pengklaim lainnya tidak bisa dihindari lagi sejak intensitas pergerakan Tiongkok di Laut China Selatan semakin meningkat. Aktivitas Tiongkok sendiri dapat dilihat melalui laporan dari Asia Maritime Transparency Initiative tahun 2019 yang memperlihatkan pola manuver *China Coast Guard* (CCG) di Laut China Selatan pada gambar 1. Pola tersebut memperlihatkan bahwa CCG bertujuan untuk menciptakan kehadiran Tiongkok secara rutin dan jelas di fitur-fitur utama yang telah mereka klaim meskipun tidak terdapat fasilitas permanen (Asia Maritime Transparency Initiative, 2019a).



Gambar 1.1 Map Tracking China Coast Guard Haijing 3308 di Laut China Selatan (September 2018 – 2019)
 Sumber: <https://amti.csis.org/signaling-sovereignty-chinese-patrols-at-contested-reefs/> (2019)

Sejalan dengan hal tersebut, agresivitas Tiongkok juga dapat dilihat melalui beberapa insiden yang telah terjadi dengan negara-negara pengklaim di Laut China Selatan, baik itu kasus penangkapan ikan ilegal maupun tindakan-tindakan konfrontatif. Sebagai contoh, pada tahun 2012, kapal Tiongkok melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Scarborough Shoal yang berjarak hanya sekitar kurang dari 209km dari pantai Filipina. Kapal Angkatan Laut Filipina pun pada saat itu dihalangi oleh dua kapal pengintai Tiongkok sehingga mereka tidak bisa melakukan apa pun (Wholf, 2015). Selain itu, Tiongkok menghalangi kapal Filipina untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Scarborough Shoal pada tahun 2016 (Mogato & Elona, 2016). Padahal, sebelumnya Tiongkok telah dinyatakan tidak berhak atas wilayah tersebut melalui Pengadilan Arbitrase Permanen Internasional (International Permanent Court of Arbitration / PCA). Di samping itu, Kapal Penjaga Pantai Tiongkok juga

mengkonfrontasi kapal bor minyak Petronas di ZEE Malaysia antara akhir Januari dan Februari 2020 (C. Thayer, 2021). Kapal pengintai maritim Tiongkok juga menabrak dan menenggelamkan kapal nelayan Vietnam di dekat Kepulauan Paracel pada April 2020 (Vu, 2020a). Oleh sebab itu, tentunya dengan melihat hanya beberapa dari sekian banyak tindakan agresif Tiongkok tersebut, upaya manajemen konflik yang selama ini telah dilakukan antara ASEAN dan Tiongkok terkait dengan pembahasan panjang COC di Laut China Selatan akan semakin sulit untuk dicapai kesepakatannya.

Eskalasi konflik yang terjadi di Laut China Selatan sendiri tentunya akan berdampak terhadap upaya negara pengklaim lainnya untuk mempertahankan wilayah klaim mereka dengan berbagai upaya. Tindakan tersebut pada akhirnya pun hanya akan semakin memperburuk keadaan sehingga potensi konflik akan terus terjadi. Sementara itu, Adam Liff dan John Ikenberry (2014) juga telah menegaskan kebangkitan Tiongkok saat ini telah melampaui pencapaian-pencapaian mereka sebelumnya disebabkan oleh klaim atas fitur-fitur dan pulau-pulau di Laut China Selatan. Oleh sebab itu, segala permasalahan tersebut akan menciptakan proses sekuritisasi yang hanya akan menyulitkan penyelesaian masalah melalui instrumen-instrumen yang ada. Dengan demikian, atas penguraian permasalahan di atas, Penulis akan berusaha untuk menganalisis bentuk-bentuk agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan serta dampaknya terhadap keamanan regional di Asia Tenggara. Selain itu, melalui hal tersebut, penulis juga akan menganalisis bentuk sekuritisasi negara-negara pengklaim Laut China Selatan atas dampak agresivitas Tiongkok.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada tindakan agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan pada tahun 2013-2021. Hal ini berkaitan dengan reklamasi pulau buatan dan militerisasi yang dilakukan Tiongkok di wilayah sengketa mulai signifikan sejak 2013. Selain itu, hal tersebut juga berkaitan dengan tindakan agresif Tiongkok di kawasan, baik itu melalui Kapal Penjaga Pantai, kapal militer Angkatan Laut, maupun dengan menggunakan kapal nelayan mereka. Di samping itu, penelitian ini juga akan berfokus terhadap dampak keamanan kawasan melalui bentuk sekuritisasi yang diinisiasi oleh para pemimpin atau pemerintah negara Vietnam, Filipina, Malaysia, serta Brunei sebagai negara pengklaim atas fitur-fitur dan pulau-pulau di Laut China Selatan melalui retorika, aksi militer, maupun hal-hal lainnya pada masa tersebut.

Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan batasan masalah tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa Republik Rakyat Tiongkok menerapkan kebijakan yang agresif di Laut China Selatan?
2. Bagaimana dampak agresivitas Republik Rakyat Tiongkok terhadap keamanan negara-negara Asia Tenggara pengklaim Laut China Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

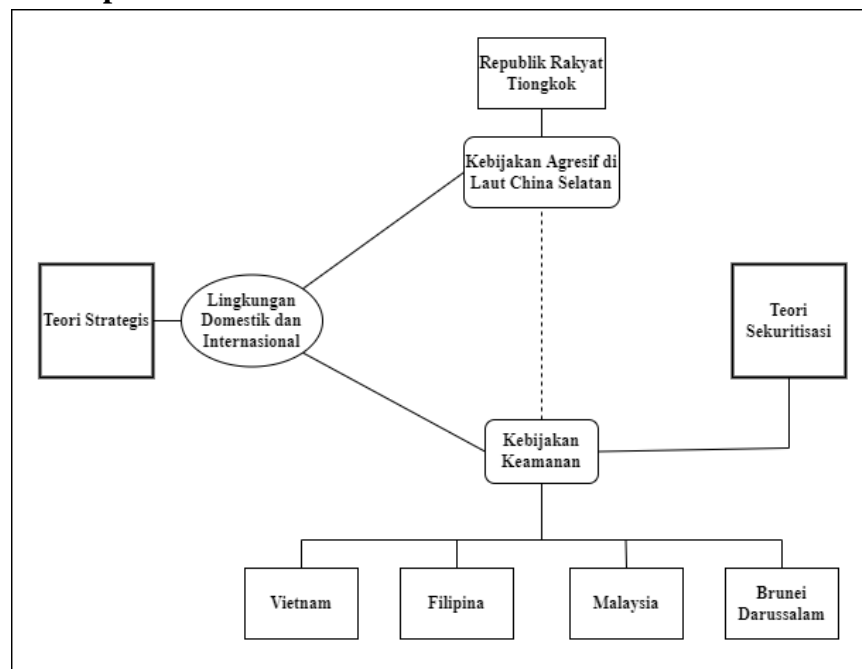
1. Untuk mengetahui alasan dan tujuan Tiongkok menerapkan kebijakan yang agresif di Laut China Selatan.

2. Untuk mengetahui dampak keamanan bagi negara-negara Asia Tenggara pengklaim Laut China Selatan terhadap agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan.

Berdasarkan tujuan penulisan tersebut maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Salah satu bentuk kontribusi dalam kajian ilmu hubungan internasional kontemporer, khususnya pada studi keamanan dan strategis, serta kajian kawasan Asia Tenggara.
2. Salah satu referensi bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan terkait dengan keamanan di Laut China Selatan.
3. Salah satu referensi bagi akademisi dan masyarakat secara luas untuk memperluas wawasan tentang studi keamanan dan strategis di Laut China Selatan.

D. Kerangka Konseptual



Bagan I. 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan bagan di atas, penelitian ini akan menggunakan Teori Strategis dan Teori Sekuritisasi. Dalam hal ini, Teori Strategis akan digunakan untuk menganalisis alasan Tiongkok menerapkan kebijakan agresif di Laut China Selatan sehingga dapat melihat alasan atas respon kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara Asia Tenggara pengklaim Laut China Selatan. Sedangkan Teori Sekuritisasi akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis dampak keamanan negara-negara Asia Tenggara pengklaim Laut China Selatan.

1. Teori Strategis

Teori Strategis hadir untuk melihat variabel maupun cara yang dapat digunakan oleh negara sebagai salah satu upaya untuk dapat mencapai objektif nasionalnya. Pemikiran tentang Teori Strategis sangat dipengaruhi oleh Carl von Clausewitz, di mana para ilmuwan Hubungan Internasional menyebut pemikirannya sebagai *the classical school of strategic theory*. Perkembangan teori ini pun masih merujuk pemikiran Clausewitz, meskipun terdapat beberapa ilmuwan yang tidak sepenuhnya sependapat terhadap aspek perang maupun strategi perang Clausewitz. Namun, menurut Betts (dikutip dalam Doeser & Frantzen, 2020, hal. 3), pandangan mengenai teori ini tetap berangkat dari pemikiran Clausewitz yang menganggap bahwa strategi merupakan pemanfaatan instrumen kebijakan rasional melalui kekuatan (*power*) yang dimiliki dibandingkan dengan tindakan yang sia-sia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa teori ini berusaha untuk menciptakan cara terbaik menurut suatu negara agar dapat mencapai kepentingannya.

Berdasarkan *joint publication* dari Department of Defense (Kementerian Pertahanan) Amerika Serikat, strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan sebagai alat pengembangan dan penggunaan dalam rangka mencapai tujuan medan, nasional, dan atau multinasional. Sedangkan, Harry Yarger memiliki pandangan bahwa strategi dapat menggunakan instrumen kekuatan nasional yang diimplementasikan melalui sebuah kebijakan. Yarger menyatakan hal tersebut sebagai berikut:

... strategy is the art and science of developing and using the political, economic, social-psychological, and military powers of the state in accordance with policy guidance to create effects that protect or advance national interests relative to other states, actors, or circumstances.
(Yarger, 2006, hal. 1)

Selain itu, Yarger juga berpendapat bahwa teori ini membantu kita untuk melihat berbagai bentuk kemungkinan dan kekuatan yang memiliki peran, mengukur biaya dan resiko dari keputusan yang diambil, serta menimbang konsekuensi yang dihasilkan oleh musuh, sekutu, dan aktor lainnya (Yarger, 2006).

M. L. R. Smith mendefinisikan teori ini sebagai sebuah studi terhadap hubungan antara tujuan dan sarana (*ends and means*), termasuk penggunaan dan ancaman melalui kekuatan bersenjata (*armed force*) sebagai pilihan rasional aktor politik untuk mengejar tujuan mereka (Smith, 2011). Melalui hal tersebut, dapat dipahami bahwa negara yang memiliki intensi meraih kepentingan nasionalnya dapat memanfaatkan berbagai sarana yang dimiliki, atau dengan kata lain menggunakan kekuatan nasionalnya. Setelah itu, dapat terbentuk sebuah strategi yang melahirkan kebijakan luar negeri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yarger (2006) yang menyatakan bahwa strategi akan memberikan arah yang tepat bagi negara untuk memaksimalkan hasil yang baik dan meminimalisir hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, Brodie memiliki pandangan

bahwa selain menggunakan kekuatan militer, ranah ekonomi juga dapat dijadikan sebagai sarana strategi sebab masing-masing bidang tersebut memiliki tujuan untuk memaksimalkan efisiensi (Barkawi, 1998). Dengan demikian, teori ini bertujuan dapat melihat apa yang ingin dicapai negara melalui strateginya, baik itu melalui pendekatan militer maupun ekonomi, atau ranah yang lebih luas lagi.

Teori Strategis juga tidak memfokuskan negara sebagai aktor utama untuk menganalisis suatu studi kasus. Teori ini lebih fleksibel dalam melihat siapa saja yang memiliki pengaruh terhadap sebuah strategi, khususnya pada pemerintahan suatu negara. Menurut Fredrik Doeser dan Filip Frantzen, pemerintahan suatu negara juga dapat dianggap sebagai aktor (Doeser & Frantzen, 2020). Selain itu, meskipun Clausewitz menganggap bahwa pentingnya negara sebagai aktor utama, namun ia tidak pernah membatasi studi perang dan strategis hanya pada negara saja (Doeser & Frantzen, 2020). Oleh sebab itu, teori ini membuka peluang analisis terhadap aktor-aktor lain selain negara. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Doeser dan Frantzen (2020) yang menganggap bahwa aktor non-negara dan gagasan bahwa untuk memahami serta menjelaskan perilaku dinamika politik domestik perlu untuk dikonsiderasikan dan diberikan relevansi yang tinggi. Di samping itu, faktor lingkungan strategis menjadi faktor determinan yang krusial terhadap tindakan aktor, di mana hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh perilaku aktor lainnya (Smith dikutip dalam Harris, 2011).

Lingkungan strategis dapat dipahami sebagai situasi atau segala bentuk hal yang dapat memengaruhi suatu negara. Yarger membagi hal ini atas lingkungan internasional (*international environment*) dan lingkungan domestik (*domestic*

environment). Lingkungan internasional merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar suatu negara yang terdiri dari lingkungan geografis, sistem internasional, aktor eksternal lainnya, termasuk kultur, kepercayaan, hingga aksinya. Sedangkan, lingkungan domestik adalah realitas lingkungan internal dan aktor-aktor internal, konstituen, institusi, dan peran organisasi internal di dalam suatu negara (Yarger, 2006). Oleh sebab itu, strategi suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, di mana pada akhirnya negara secara rasional akan memilih kebijakan yang menurut mereka paling tepat.

Untuk mencapai tujuannya, tentu negara memiliki instrumen agar dapat memperlancar kebijakan yang diimplementasikan. Dengan begitu, kekuatan nasional dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai kepentingan negara. Barkawi (1998) menyinggung bahwa penggunaan '*organized violence*' atau dalam hal lain mungkin dapat dipahami sebagai kekuatan militer akan dilakukan sebagai pilihan rasional. Yarger juga menambahkan bahwa aktor akan menggunakan *power* yang dimiliki, baik itu sumber daya atau sarana, agar dapat mengontrol suatu keadaan dan lokasi geografis melalui kebijakan koersif maupun persuasif untuk mencapai tujuan (Yarger, 2006). Sejalan dengan hal tersebut, negara dapat menggunakan kekuatan bersenjata untuk membuat lawannya tunduk terhadap keinginan atau pun kepentingan negara tersebut (Doeser & Frantzen, 2020). Oleh sebab itu, menurut Luttwak, dalam konteks pertikaian oleh negara-negara, strategi yang hanya akan menguntungkan satu pihak saja, dan pada akhirnya dapat menciptakan dilema keamanan (*security dilemma*) bagi negara maupun aktor lain (Barkawi, 1998; Yarger, 2006).

Penelitian ini akan berfokus dengan menggunakan Teori Strategis untuk melihat strategi yang digunakan Tiongkok dalam konflik di Laut China Selatan. Selain itu, sejalan dengan pandangan Smith (2011) terkait dengan teori ini maka penelitian ini dapat menganalisis alasan Tiongkok dalam melakukan perilaku yang dianggap agresif di Laut China Selatan untuk mengejar objektif mereka melalui tujuan dan perangkat yang dimiliki (*ends and means*). Demikian pula, teori ini juga dapat melihat keadaan lingkungan strategis yang menjadi penyebab aktor untuk menentukan kebijakannya. Dalam hal ini, lingkungan strategis dapat dipahami sebagai perilaku negara lain di Laut China Selatan dan kondisi geografi. Di samping itu, teori ini juga dapat melihat perilaku aktor non-negara dan kondisi politik domestik yang berpotensi dalam memengaruhi strategi suatu negara. Oleh sebab itu, penelitian ini akan melihat berbagai kebijakan agresif yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menjawab rumusan masalah pertama penelitian ini.

Selain itu, teori ini juga diharapkan dapat menjelaskan alasan dibalik kebijakan yang diimplementasikan oleh negara-negara Asia Tenggara pengklaim Laut China Selatan terhadap dampak agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan. Hal tersebut sangat penting agar perilaku masing-masing negara pengklaim dapat dilihat dalam merespon agresivitas Tiongkok. Dengan demikian, hal ini juga dapat menilai variabel hubungan (militer atau ekonomi) antara Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara pengklaim lainnya. Oleh sebab itu, teori ini juga dapat menjawab rumusan masalah kedua dari penelitian ini.

2. Teori Sekuritisasi

Konsep keamanan mengalami perluasan pasca Perang Dingin sehingga muncul pandangan baru untuk membahas kajian tersebut. Pemikir-pemikir Copenhagen School hadir dengan memberikan kerangka analisis baru untuk melihat konteks keamanan secara luas. Copenhagen School menitikberatkan pada keamanan yang dimaknai melalui proses intersubjektif serta apa saja efek politik terkait dengan konstruksi keamanan tersebut (McDonald, 2008). Selain itu, selain fokus terhadap perluasan keamanan yang tidak hanya semata-mata membahas keamanan negara, Barry Buzan dan Lene Hansen menyatakan bahwa Copenhagen School lebih berfokus terhadap sekuritisasi (Buzan & Hansen, 2009). Dalam hal ini, teori sekuritisasi menjadi alat untuk menganalisis fenomena-fenomena keamanan yang telah merambah ke berbagai sektor. Selain itu, para pemikir teori sekuritisasi sendiri membagi lima sektor tersebut ke dalam sektor militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Eroukhmanoff, 2017). Namun, sebenarnya masih terdapat sektor lainnya, seperti pembahasan mengenai keamanan kesehatan, pangan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, teori ini mengartikulasikan ancaman terhadap sektor spesifik dalam ancaman pada objek rujukannya. Dengan demikian, 'sektorisasi keamanan' menjadikan setiap permasalahan akan berkaitan dengan karakteristik objek yang akan dibahas (Eroukhmanoff, 2017).

Ole Waever merupakan pemikir yang pertama kali memperkenalkan teori sekuritisasi. Waever menguraikan teori ini secara mendalam pada tahun 1995 dengan acuan terhadap konstruksi ancaman yang diskursif (McDonald, 2008). Teori ini secara spesifik mendefinisikan bahwa proses sekuritisasi merupakan proses di mana seorang aktor mendeklarasikan isu tertentu atau aktor menjadi 'ancaman eksistensial' terhadap

objek tertentu (McDonald, 2008). Eroukhmanoff (2017) juga menjelaskan bahwa teori sekuritisasi menjadikan isu-isu politik sebagai keamanan ekstrim yang perlu ditangani pada saat retorika berbahaya, mengancam, mengkhawatirkan, dan lain-lain disampaikan oleh aktor yang memiliki kekuatan institusional dalam menggerakkan suatu isu. Oleh sebab itu, hal tersebut memungkinkan terjadinya kondisi politik yang tidak normal serta tindakan darurat sebagai langkah mengatasi krisis tersebut (McDonald, 2008). Selain itu, Waever menekankan bahwa proses sekuritisasi cenderung berhasil apabila suatu ancaman dihasilkan oleh suara institusional para elit (Waever dikutip dalam McDonald, 2008).

Para elit yang dimaksud oleh Waever dalam melakukan sekuritisasi dapat diartikan sebagai pemimpin negara. Dalam hal ini, pemimpin negara tersebut dapat dikategorikan berdasarkan rezim yang sedang berkuasa pada satu negara dan memiliki kekuatan secara politik. Selain itu, dapat didefinisikan juga bahwa pemimpin negara tidak selamanya sebagai presiden maupun perdana menteri. Namun, para elit tersebut juga bisa dipahami sebagai kabinet pemerintahan suatu negara, seperti menteri pertahanan, menteri kesehatan, serta institusi-institusi lainnya. Melalui hal tersebut, McDonald (2008) berpendapat bahwa para pemimpin politik melalui otoritasnya dapat berbicara atas nama negara sehingga dapat menarik perhatian publik lalu mengambil kebijakan-kebijakan darurat, seperti pengerahan pasukan. Selain itu, Waever (dikutip dalam McDonald, 2008) juga menambahkan bahwa penggunaan kata 'keamanan' dan 'ancaman' dapat memberikan keleluasaan bagi pemimpin negara untuk melakukan tindakan apa pun yang diperlukan. Dengan demikian, proses sekuritisasi terhadap suatu isu akan terjadi saat hal tersebut dianggap sebagai ancaman yang eksistensial sehingga

membutuhkan tindakan yang segera diikuti dengan tindakan pembenaran di luar proses politik yang normal (Viana e Silva & Pereira, 2019).

Waever lebih lanjut memperlihatkan bahwa terdapat beberapa aspek penilaian atas proses sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor. Hal tersebut dipaparkan melalui karyanya yang berjudul “*Securitization and Desecuritization*”. Di dalam penjelasannya, Waever menyatakan bahwa yang perlu diperhatikan saat terjadinya sekuritisasi maupun de-sekuritisasi adalah: (1) kapan, kenapa, dan bagaimana para elit melabeli suatu isu sebagai “masalah keamanan”, (2) kapan, kenapa, dan bagaimana upaya tersebut gagal atau berhasil dilakukan, (3) apa yang menjadi tujuan kelompok lain terhadap isu yang disekuritisasi, (4) apakah dapat dilakukan upaya untuk menjauhkan suatu isu dari agenda sekuritisasi, atau bahkan desekuritisasi atas isu yang telah disekuritisasi (Waever, 2007). Oleh sebab itu, banyak penyebab yang dapat memengaruhi proses sekuritisasi (Buzan & Waever, 2003). Dengan begitu, dapat dipahami bahwa pandangan yang holistik terhadap upaya sebuah sekuritisasi dan desekuritisasi suatu sangat penting agar dapat menjelaskan dan melihat setiap peran dari aktor dan determinan dari faktor internal maupun eksternal.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk melihat apakah terjadi sekuritisasi dalam bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei sebagai negara pengklaim di Laut China Selatan terhadap respon ancaman dari agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan melalui pandangan Waever (2007) yang berusaha melihat penyebab-penyebab sekuritisasi. Penelitian ini hanya akan difokuskan terhadap pandangan Waever mengenai proses terjadinya sekuritisasi, yaitu yang akan dilihat melalui kapan, kenapa, dan bagaimana para pemimpin melabeli

suatu isu sebagai masalah keamanan. Hal tersebut akan ditinjau melalui retorika pemimpin-pemimpin negara pengklaim di wilayah Laut China Selatan. Selain itu, akan dilihat pula bentuk kebijakan yang diinisiasi, baik itu dalam bentuk koersif maupun persuasif. Hal tersebut sangat penting untuk melihat apakah negara-negara pengklaim ini menganggap perilaku Tiongkok di Laut China Selatan sebagai ancaman atau tidak. Penelitian ini hanya akan terbatas pada bentuk sekuritisasi keamanan yang dilakukan oleh negara-negara pengklaim tersebut. Dengan demikian, bentuk-bentuk respon setiap negara pengklaim tersebut dapat dikelompokkan dan melihat alasan dibalik perilaku setiap pengklaim.

3. Definisi Variabel Agresivitas

a) Penjelasan Umum tentang Tipologi Perilaku Tiongkok di Laut China Selatan

Penelitian-penelitian tentang perilaku Tiongkok di Laut China Selatan masih cukup acak dalam mendefinisikan istilah perilaku yang tepat terhadap perilaku Tiongkok. Literatur-literatur tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga tipologi perilaku negara, yakni agresif, asertif, dan koersif. Akan tetapi, tipologi agresivitas, asertivitas, maupun koersivitas secara umum belum menjadi bagian dari teori yang menjelaskan tentang perilaku negara dalam studi Hubungan Internasional. Oleh sebab itu, masih banyak peneliti yang menggunakan definisi tentang perilaku negara secara subjektif sesuai dengan argumen peneliti tersebut. Namun, di satu sisi, terdapat pula penelitian yang tidak mendefinisikan tipologi maupun membuat ukuran sebagai parameter atas perilaku Tiongkok di Laut China Selatan.

Pendefinisian dari perilaku-perilaku Tiongkok pun cukup berbeda berdasarkan dari tipologi yang digunakan oleh peneliti. Sebagai contoh, Ketian Zhang (2019, hal. 120) mendefinisikan perilaku koersif Tiongkok sebagai “... *as the threat or use of negative actions by a state to demand a change in the behavior of another state.*”. Zhang menyatakan bahwa tindakan secara fisik dan ancaman menjadi pertimbangan pada konteks ini dan menganggap bahwa tindakan fisik seharusnya mampu memperlihatkan penyelesaian lebih nyata dibandingkan dengan aksi ancaman. Selain itu, Andrew Chubb (2021, hal. 84) mendefinisikan perilaku Tiongkok di Laut China Selatan sebagai tindakan asertif, di mana pada asertivitas pada penelitiannya didefinisikan sebagai “*statements and behaviours that strengthen the state’s position in the dispute.*”. Chubb mendefinisikan asertif sebagai variabel yang dapat digunakan pada konteks sengketa maritim dan teritorial yang memiliki dampak terhadap stabilitas internasional melalui pernyataan serta perilaku negara yang berupaya memperkuat posisi mereka (Chubb, 2021, hal. 86). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Chubb (2021, hal. 86) mengukur perilaku Tiongkok sebagai tindakan yang asertif melalui konsepsinya terhadap asertivitas dengan mempertimbangkan pernyataan verbal hingga kepada penggunaan pasukan militer.

Akan tetapi, di satu sisi, berbeda dengan penelitian yang mendefinisikan tipologi perilaku Tiongkok sebagai tindakan yang koersif maupun asertif, variabel agresivitas sejauh ini belum pernah diberi definisi atau parameter untuk mengukur perilaku Tiongkok berdasarkan beberapa penelitian (lihat lebih lanjut Darmawan & Mahendra, 2018; Ma’ruf et al., 2020; C. A. Thayer, 2011b; H. Zhang & Bateman, 2017) maupun berita di media daring. Meskipun demikian, beberapa penelitian yang menggunakan

variabel “agresif” sebagai perilaku Tiongkok di Laut China Selatan secara tidak langsung memperlihatkan bentuk-bentuk tindakan Tiongkok yang dapat dikategorikan secara umum sebagai perilaku yang agresif. Namun, hal tersebut tentunya tidak cukup untuk melihat secara holistik perilaku “agresif” Tiongkok terhadap negara-negara pengklaim Laut China Selatan lainnya. Bahkan, Jaebeom Kwon (2019) berargumen bahwa perilaku Tiongkok di Laut China Selatan sebaiknya dikategorikan sebagai asertif defensif daripada agresif dengan anggapan bahwa Tiongkok tidak menyerang atau pun mengambil alih pulau negara lain di perairan tersebut, melainkan lebih kepada upaya untuk mempertahankan kedaulatannya di wilayah sengketa. Akan tetapi, pernyataan itu perlu untuk ditinjau kembali sebab apabila menilik konflik secara historis, telah terjadi beberapa insiden antara Tiongkok dengan negara lain yang melibatkan militer sejak tahun 1970an, dan secara hukum internasional (termasuk putusan PCA tahun 2016) klaim unilateral Tiongkok di Laut China Selatan tidak diakui.

Oleh sebab itu, penelitian skripsi ini akan mendefinisikan variabel agresif sebagai perilaku Tiongkok beserta parameternya untuk melihat langkah strategis mereka melalui instrumen-instrumen yang dimiliki. Alasan penggunaan kata agresif pada perilaku Tiongkok adalah sebab meskipun selama ini beberapa artikel merujuk kata agresif terhadap perilaku Tiongkok, namun belum ada sama sekali parameter yang mendukung hal tersebut. Selain itu, pandangan Kwon (2019) yang menganggap bahwa penggunaan kata agresif lebih tepat pada tindakan menyerang atau pun mengambil alih pulau negara lain menjadi relevan dengan perilaku Tiongkok di Laut China Selatan selama ini. Hal ini juga merupakan sebagai upaya untuk mendefinisikan perilaku Tiongkok sesuai dengan perilakunya terhadap negara pengklaim lain di Laut China

Selatan. Dengan demikian, pada bagian selanjutnya akan dijabarkan pendefinisian dari agresivitas Tiongkok sebagai dasar untuk mengkategorikan perilaku Tiongkok di Laut China Selatan.

b) Pendefinisian Variabel Agresivitas sebagai Tipologi Perilaku Tiongkok di Laut China Selatan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan tipologi agresif sebagai perilaku Tiongkok di Laut China Selatan telah beberapa kali digunakan, namun belum terdefiniskan dan belum diberikan parameter yang jelas. Meskipun demikian, pada beberapa penelitian tersebut tipologi agresif tersebut diasosiasikan dengan tindakan Tiongkok yang berkaitan dengan militer, baik itu peningkatan alokasi militer maupun aksi militer. Di samping itu, merujuk pada pernyataan Kwon (2019, hal. 53) yang mengkorelasikan tindakan agresif sebagai upaya menyerang atau pun mencaplok wilayah negara lain maka dapat dipahami bahwa terdapat pola tertentu yang dapat mendefinisikan perilaku agresif Tiongkok di Laut China Selatan.

Oleh sebab itu, pada penelitian ini, Penulis mendefinisikan variabel agresif sebagai tindakan suatu negara dalam menggunakan instrumen-instrumen yang dimilikinya dengan tujuan mengancam atau pun menyerang negara lain. Dalam konteks penelitian ini, tindakan “menyerang” bukan hanya dalam bentuk penyerangan terhadap wilayah negara atau invasi militer, melainkan juga dapat diartikan dalam bentuk penyerangan terhadap aktor militer maupun aktor sipil dari negara lain. Lebih lanjut, hal tersebut dapat lebih diperinci pada kasus sengketa maritim di Laut China Selatan. Di

samping itu, untuk melihat perilaku yang terjadi secara spesifik maka akan diberikan pula kategorisasi dari setiap tindakan agresif yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut China Selatan.

Terdapat tiga kategori perilaku agresif Tiongkok pada sengketa maritim dan wilayah teritorial di Laut China Selatan yang akan dipetakan pada penelitian ini. Hal tersebut antara lain adalah demonstratif, defensif, dan ofensif. Alasan dari pengkategorian tersebut adalah sesuai dengan perilaku Tiongkok terhadap negara pengklaim lainnya di Laut China Selatan. Ketiga kategori ini juga telah mewakili perilaku Tiongkok di wilayah maritim negara pengklaim lain sehingga nantinya terdapat beberapa parameter yang akan dikelompokkan pada kategori-kategori tersebut sesuai dengan tindakannya.

Aksi demonstratif dalam hal ini dapat dipahami sebagai tindakan suatu negara yang menggunakan kekuatan minimal yang tidak memiliki potensi untuk mengundang konfrontasi secara langsung dengan negara lain. Tindakan demonstratif di area sengketa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Chubb (2021, hal. 89), secara garis besar membagi dua tipikal yang dapat diasosiasikan dengan aksi ini, yakni melalui tindakan fisik maupun non-fisik. Untuk tindakan fisik, dapat dilihat melalui patrol udara dan laut, survei ilmiah, eksplorasi sumber daya alam, pekerjaan konstruksi, serta aktivitas-aktivitas yang melibatkan masyarakat sipil, seperti turis, aktivisme, dan eksploitasi sumber daya alam. Sementara itu, untuk tindakan non-fisik dapat ditinjau melalui perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga atas pengembangan sumber daya, atau proses dari administratif atau peradilan domestik atas wilayah yang menjadi sengketa (Chubb, 2021, hal. 89). Oleh sebab itu, tindakan demonstratif ini dapat menjadi parameter bagi

aktivitas non-militer Tiongkok di Laut China Selatan, aktivitas kapal survei, patroli kapal penjaga pantai, dan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah negara lain, di mana hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi negara lain meskipun tidak menjadi tindakan konfrontatif secara langsung terhadap negara-negara yang bersengketa.

Di samping itu, kategori defensif pada penelitian ini akan dilihat sebagai upaya suatu negara berusaha untuk mempertahankan klaimnya pada kasus sengketa melalui upaya modernisasi militer, peningkatan kapabilitas militer, ataupun militerisasi di suatu area tanpa melakukan intensi untuk menyerang atau mengancam secara langsung kepada negara lain, melainkan hanya menghasilkan *deterrent effect*. Pemahaman ini dapat ditinjau dari pernyataan Taylor Fravel tentang penggunaan kekuatan sebagai upaya mempertahankan klaim dan mencegah ancaman, serta melalui pandangan Adam P. Liff dan John Ikenberry mengenai modernisasi militer Tiongkok sebagai respon reaktif dan defensif terhadap negara-negara tetangganya (Fravel, 2008; Liff & Ikenberry, 2014.). Di samping itu, kategori ini juga memiliki relasi dengan pernyataan K. Zhang (2019, hal. 122) yang menyatakan bahwa terdapat bentuk aktivitas militer yang non-kinetik, akan tetapi masih bersifat militerisasi. Oleh sebab itu, kategori ini dapat dilihat melalui tindakan militerisasi maupun modernisasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok di pulau-pulau yang menjadi sengketa dengan negara pengklaim lainnya dengan asumsi bahwa hal tersebut merupakan sebagai tindakan untuk menekankan klaim mereka dan sebagai ancaman yang tidak langsung.

Selanjutnya, tindakan ofensif akan menjadi kategori sebagai parameter dalam penelitian ini. Tingkat eskalasi tertinggi antar negara pada permasalahan sengketa maritim atau pada sengketa wilayah teritorial adalah dengan menggunakan kekuatan

militer/non-militer atau pencaplokan wilayah secara langsung. Hal tersebut diasosiasikan terhadap kategori agresif ini dengan menggunakan salah satu tipologi *use of force* yang dijelaskan oleh Fravel (2008). Akan tetapi, penggunaan kekuatan militer juga dapat dianggap melalui tampilan, ancaman, dan penggunaan kekuatan tanpa perang dengan merujuk pernyataan dari Ketian Zhang (2019). Selain itu, Liff dan Ikenberry (2014) menjelaskan bahwa peningkatan kekuatan militer Tiongkok diikuti dengan perluasan kapabilitas militer beserta kebijakannya memperlihatkan agresivitas mereka. Patroli serta latihan militer dianggap semakin memperparah tensi yang ada sehingga peluang untuk terjadinya bentrokan atau insiden dengan negara lain semakin besar (Liff & Ikenberry, 2014). Oleh sebab itu, kategori ofensif ini akan melihat perilaku yang menggunakan militer dan non-militer sebagai upaya untuk mengancam atau menyerang negara lain, dan bahkan dengan melakukan pendudukan wilayah negara lain.

Di samping itu, kategori ini juga menggunakan *gray-zone coercion* sebagai hal yang dibedakan dengan aksi militer sebab negara menggunakan masyarakat sipil, atau dalam konteks perilaku Tiongkok di Laut China Selatan adalah dengan memberdayakan *fishing militia*, di mana hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan nyata kepada targetnya. Menurut K. Zhang (2019), *gray-zone coercion* merupakan tindakan yang dilakukan oleh agensi pemerintahan dengan cara *physical violence* atau kekerasan fisik yang bertujuan untuk mengubah perilaku targetnya. Hal tersebut juga dianggap dapat menguntungkan negara yang melakukan hal tersebut sebab bisa mengontrol eskalasi yang terjadi dari dampak yang dihasilkan dengan menyangka bahwa tindakan tersebut bukan sebuah aksi militer. Sementara itu, K. Zhang (2019) memberikan contoh tentang perilaku Tiongkok di Scarborough Shoal sebagai tindakan yang koersif sebab mereka

memiliki target yang jelas, ancaman maupun langkah koersif untuk memberi tekanan, dan memiliki tujuan yang jelas. Dengan demikian, hal tersebut memperlihatkan bahwa Tiongkok memiliki intensi untuk melakukan konfrontasi terbuka dengan pihak sengketa lainnya yang memiliki risiko tinggi. Tindakan ofensif ini pada akhirnya akan dinilai melalui aksi yang dilakukan oleh pihak militer dan non-militer Tiongkok, di mana aktivitas tersebut terdiri dari tembakan peringatan, pemberdayaan China Coast Guard (CCG) untuk mengganggu negara lain, penembakan melalui kapal Tiongkok, serta bentrokan atau insiden dengan negara lain. Rangkuman dari ketiga kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1. di bawah.

Tabel 1.1 Kategori Perilaku Agresif Tiongkok pada Sengketa Maritim dan Wilayah Teritorial di Laut China Selatan

Tipe-tipe Agresif	Definisi	Parameter
Demonstratif	Penggunaan kekuatan minimal yang tidak memiliki potensi untuk mengundang konfrontasi secara langsung dengan negara lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas kapal survei. • Patroli kapal penjaga pantai. • Penangkapan ikan secara ilegal di wilayah negara lain. • <i>Fishing ban</i>
Defensif	Modernisasi/peningkatan kapabilitas militer/militerisasi di suatu area tanpa adanya intensi untuk menyerang atau mengancam negara lain secara langsung (hanya menghasilkan <i>deterrent effect</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Militerisasi pulau-pulau yang dikuasai oleh Tiongkok.
Ofensif	Penggunaan kekuatan militer dan non-militer sebagai upaya untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Tembakan peringatan (water cannon).

mengancam hingga menyerang negara lain, dan bahkan pencaplokan wilayah negara lain.

- Gangguan kepada negara lain.
- Menabrakkan kapal ke kapal negara lain.

Sumber: Chubb, A. (2021). PRC assertiveness in the South China sea: Measuring continuity and change, 1970–2015. *International Security*, 45(3), 79–121., Fravel, M. T. (2008). Power Shifts and Escalation: Explaining China’s Use of Force in Territorial Disputes. *International Security*, 32(3), 44–83., Liff, A. P., & Ikenberry, G. J. (2014). The Rise and Fall of the Great Powers in the Twenty-first Century. *International Security*, 39(2), 52–91., Zhang, K. (2019). Cautious Bully. *International Security*, 44(1), 117–159.,

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Taylor & Bogdan (dikutip dalam Hendrarso, 2005) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang dapat menghasilkan sebuah data deskriptif tentang perkataan baik secara lisan maupun tertulis serta pengamatan tingkah laku melalui orang yang diteliti. Melalui pendekatan kualitatif, Penulis akan melakukan analisis terhadap penyebab Tiongkok melakukan kebijakan yang agresif di Laut China Selatan sehingga berdampak terhadap keamanan bagi negara-negara Asia Tenggara pengklaim Laut China Selatan. Penulis menganggap metode ini relevan dengan penelitian ini agar dapat menemukan fenomena yang terjadi atas studi kasus yang dianalisis melalui data primer maupun data sekunder.

2. Teknik Penelitian

Tempat yang diambil pada penelitian kali ini akan dilakukan dan berasal dari dokumen-dokumen resmi secara daring yang membahas tentang Tiongkok di Laut China Selatan serta kebijakan negara-negara pengklaim terhadap agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan. Selain itu, untuk kebutuhan data sekunder juga akan diperoleh secara daring melalui laman berita yang kredibel, jurnal internasional, serta lembaga non-pemerintahan internasional, seperti Council on Foreign Relations, Center for Strategic and International Studies (Washington), dan lain-lain.

3. Jenis Penelitian

1) Studi Pustaka – Dokumen Data Primer dan Data Sekunder

Penelitian kali ini menggunakan sumber data primer melalui dokumen-dokumen resmi, seperti laporan resmi pemerintah negara lain, pernyataan resmi pemerintah, dan sebagainya. Untuk data primer sendiri terdiri dari Dokumen Resmi dari laman Pemerintah Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, Amerika Serikat, dan United Nations. Selain itu, untuk data sekunder sendiri akan diperoleh dari laman berita yang kredibel, jurnal internasional, serta lembaga non-pemerintahan internasional, seperti Asia Maritime Transparency Initiative, Council on Foreign Relations, Center for Strategic and International Studies (Washington), China Power Project, dan lain-lain.

4. Tahapan Penelitian

- 1) Mencari gagasan utama atas penelitian terkait.
- 2) Mencari informasi dan mengumpulkan bahan bacaan yang mendukung topik penelitian.
- 3) Melakukan spesifikasi pada fokus penelitian dan mengelompokkan terhadap bahan yang digunakan dalam penelitian.
- 4) Menganalisis data dan fakta atas bahan penelitian yang telah dikumpulkan sebelumnya.
- 5) Menghasilkan konklusi melalui penelitian berdasarkan bahan yang telah dianalisis sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Agresif, Asertif, dan Koersif Tiongkok di Laut China Selatan

Berdasarkan literatur dari beberapa penelitian yang membahas tentang perilaku Tiongkok di Laut China Selatan memperlihatkan bahwa para peneliti cenderung menggunakan kata asertif dan agresif. Penggunaan perilaku tersebut mulai banyak digunakan pada jurnal artikel, media, dan bahkan karya ilmiah sekitar tahun 2011 ke atas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari terlihatnya perbedaan pola perilaku Tiongkok, khususnya dalam konteks keamanan di Laut China Selatan. Tiongkok dianggap bertindak asertif maupun agresif di perairan ini kepada negara-negara pengklaim Laut China Selatan. Secara garis besar, hal yang cukup dominan disorot oleh para peneliti adalah peningkatan militer Tiongkok di kawasan yang secara signifikan dapat dilihat dari PLAN atau pasukan angkatan laut Tiongkok, meskipun saat ini terdapat pendekatan-pendekatan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai bentuk koersif Tiongkok terhadap negara pengklaim Laut China Selatan lainnya. Oleh sebab itu, untuk melihat kebaruan dari penelitian pada skripsi ini penting untuk memperhatikan dan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perilaku asertif maupun agresif Tiongkok di kawasan.

Agar dapat mengetahui suatu negara melakukan perilaku agresif, asertif, maupun koersif tentunya diperlukan parameter untuk meninjau hal yang dimaksud. Oleh sebab itu, beberapa penelitian terdahulu yang akan ditinjau pada bagian ini akan memperlihatkan bagaimana para peneliti mengukur perilaku Tiongkok melalui tindakan

yang dapat dikategorikan mengancam pihak lain di wilayah sengketa Laut China Selatan. Dengan demikian, penting untuk melihat hal-hal yang berusaha untuk disampaikan oleh penelitian terdahulu tersebut untuk mengamati bagaimana perilaku Tiongkok di Laut China Selatan dianggap mengancam aktor-aktor lain.

Untuk melihat studi tersebut, Carlyle A. Thayer (2011) menyatakan terdapat bentuk baru dari tindakan tegas yang agresif Tiongkok di Laut China Selatan pada tahun 2011. Dalam hal ini, Thayer menjelaskan bahwa terdapat dua faktor utama yang menerjemahkan perilaku Tiongkok di Laut China Selatan, yakni kedaulatan dan sumber daya hidrokarbon (Thayer, 2011). Thayer mengungkapkan bahwa bentuk dari tindakan tegas agresif Tiongkok dapat dilihat melalui tiga insiden utama di Laut China Selatan. Insiden-insiden tersebut terjadi melibatkan Filipina dan Vietnam, di mana Tiongkok dianggap memberikan tindakan tegas kepada kedua negara tersebut, meskipun tidak semuanya melibatkan konfrontasi militer (Thayer, 2011). Penelitian ini memperlihatkan tindakan tegas yang agresif melalui pendekatan badan kemaritiman Tiongkok untuk menekankan klaim kedaulatan mereka serta kepentingan sumber daya alam yang ada di Laut China Selatan.

Selain itu, sejalan dengan Thayer, Alastair Iain Johnson (2013) di dalam penelitiannya mencoba untuk melihat predikat "*new assertiveness*" yang pada saat itu banyak digunakan oleh media, para pundit, dan juga dari beberapa analisis akademik. Johnston meninjau perilaku asertif Tiongkok berdasarkan beberapa peristiwa yang terjadi di antara akhir tahun 2009 dan 2010. Peristiwa tersebut dilihat dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Tiongkok, yakni Laut China Selatan yang disebut menjadi

salah satu kepentingan utama Tiongkok, ancaman pemberian sanksi kepada produsen senjata Amerika Serikat yang menjual senjata Taiwan, kunjungan Dalai Lama, insiden Senkaku/Diaoyudao, kebijakan reaktif/pasif terhadap insiden diplomatis dengan Korea Utara (Johnston, 2013). Akan tetapi, hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat pola atau pun perilaku asertif Tiongkok yang secara menyeluruh dapat dikatakan baru atas kebijakan luar negeri mereka pada tahun 2010. Alasannya adalah, yang pertama pernyataan terdapat perilaku asertif Tiongkok yang baru mengabaikan tindakan asertif mereka terkait dengan permasalahan kedaulatan dan wilayah sebelum tahun 2010 serta banyak terdapat salah pembacaan atas hal-hal spesifik atas tindakan tegas Tiongkok pada tahun 2010 (Johnston, 2013).

Meskipun demikian, hal yang penting untuk dilihat dalam penelitian Johnston adalah bahwa perilaku Tiongkok di Laut China Selatan pada periode tersebut dianggap cukup baru. Hal ini dinyatakan pada penelitian Johnston bahwa peran dari PLA (*People's Liberation Army*) atau tentara nasional Tiongkok yang memiliki kemungkinan untuk menjadi aktor independen untuk kebijakan luar negeri Tiongkok, khususnya intensi mereka yang menginginkan Tiongkok untuk lebih menonjol di area maritim yang menjadi sengketa (Johnston, 2013). Selain itu terdapat kemungkinan faktor eksternal dari negara-negara pengklaim Laut China Selatan lainnya yang menyebabkan Tiongkok berani untuk mengambil resiko tinggi di wilayah sengketa tersebut (Johnston, 2013). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada tahun 2010 tersebut tindakan asertif Tiongkok tidak sepenuhnya dapat dianggap baru sebab media, pundit, maupun analisis akademik yang membahas kebaruan asertif Tiongkok disebabkan oleh kesalahan dalam kontekstualisasi diplomasi Tiongkok dan spesifikasi argumen penyebab yang kurang

kuat. Namun, untuk perilaku mereka di Laut China Selatan memperlihatkan kebaruan tindakan tegas berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Sementara itu, berbeda dari dua penelitian sebelumnya, Jaebeom Kwon (2019) menjelaskan penyebab dari tindakan asertif Tiongkok di Laut China Selatan. Kwon menyebutkan bahwa Tiongkok mulai melakukan kebijakan yang asertif di Laut China Selatan sejak akhir tahun 2000an dan menyatakan bahwa perilaku mereka di kawasan tersebut cenderung sedang pada tahun 1990-an hingga 2000-an (Kwon, 2019, hal. 49). Selain itu, Kwon menyatakan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan Tiongkok bersikap asertif di Laut China Selatan. Kwon menjabarkan bahwa kekuatan angkatan laut Tiongkok yang semakin kuat merupakan sebagai faktor internal, serta kehadiran rival strategis mereka – Vietnam dan Amerika Serikat – di kawasan merupakan faktor eksternal (Kwon, 2019). Kwon mengkategorikan bahwa perilaku Tiongkok di Laut China Selatan sebagai tindakan yang asertif dengan alasan bahwa tidak menyerang atau pun mengambil alih pulau negara lain wilayah sengketa, melainkan hanya berupaya untuk mempertahankan kedaulatan mereka di perairan tersebut (Kwon, 2019). Dengan kata lain, Kwon menyebutkan bahwa pengaruh dari kondisi internal dan eksternal Tiongkok menjadi determinan penting atas perilaku Tiongkok di Laut China Selatan.

Di satu sisi, berbeda dari penelitian Kwon yang berusaha untuk menjelaskan perilaku Tiongkok di Laut China Selatan melalui penggunaan kata kerja asertif, Ketian Zhang (2019) pada penelitiannya ingin melihat kapan, mengapa, serta bagaimana Tiongkok di wilayah sengketa tersebut melakukan tindakan yang koersif dengan

menggunakan *cost-balancing theory*. Zhang (2019) mendefinisikan koersif sebagai “*use or threat of negative actions such as economic sanctions and military means to force the target to change its behavior*”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa definisi tersebut hanya akan terbatas pada ranah ekonomi dan militer yang dapat memengaruhi keamanan suatu negara yang memiliki permasalahan satu sama lain, di mana konteksnya pada penelitian tersebut adalah Tiongkok dengan negara-negara pengklaim Laut China Selatan. Di samping itu, berbeda dengan Kwon yang menyebutkan bahwa Tiongkok mulai melakukan tindakan asertif di Laut China Selatan sejak akhir tahun 2000-an, Zhang (2019) berpendapat bahwa Tiongkok telah melakukan pendekatan militer di wilayah sengketa tersebut pada tahun 1990-an. Contoh pendekatan militer pada penelitian tersebut adalah saat Tiongkok mengambil alih Mischief Reef yang juga diklaim oleh Filipina.

Penelitian Zhang tersebut memiliki tiga penemuan penting yang menjelaskan perilaku Tiongkok di Laut China Selatan. Ketiga hal tersebut antara lain, Tiongkok dianggap bertindak sebagai “*cautious bully*” di Laut China Selatan, Tiongkok jarang menggunakan tindakan koersif, dan yang terakhir adalah saat Tiongkok bertambah kuat, mereka lebih cenderung untuk menggunakan instrumen nonmiliter dibandingkan dengan kekuatan militernya (Zhang, 2019). Hal tersebut tentunya memperlihatkan perilaku yang cukup jarang terjadi bagi negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat sebab alih-alih mengancam negara lain dengan aksi militer koersif, Tiongkok lebih memilih menggunakan cara lain. Di satu sisi, penelitian Zhang ini tidak banyak menyinggung tentang instrumen-instrumen yang digunakan oleh Tiongkok untuk mencapai tujuan mereka.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Andrew Chubb (2021) di dalam penelitiannya menjelaskan untuk memahami dinamika konflik yang terjadi di Laut China Selatan dapat dilihat melalui sebuah pola yang terjadi secara kontinu dan berubah dari pemerintahan Tiongkok. Selain itu, mendukung pernyataan Zhang (2019) yang menjelaskan tentang kapan Tiongkok mulai bersikap asertif di Laut China Selatan, Chubb menambahkan argumen lain bahwa tindakan Tiongkok yang bersikap koersif pada tahun 2007 ditinjau melalui perubahan perilaku mereka yang terjadi pada akhir tahun 1990an melalui objektif strategis yang hadir pada tahun 1970an. Oleh sebab itu, Chubb memperlihatkan pola melalui tipologi perilaku negara untuk sengketa maritim dan teritorial melalui perilaku Tiongkok di Laut China Selatan sejak tahun 1970 hingga 2015 dengan menganalisis *key turning points* atau titik balik utama. Chubb pun membuat *original time series of change* untuk melihat perubahan perilaku Tiongkok di Laut China Selatan sejak tahun 1970 hingga 2015 (Chubb, 2021). Sementara itu, untuk melihat perilaku Tiongkok di wilayah sengketa tersebut, Chubb menggunakan kata “asertif” lalu membaginya ke dalam empat tipe variabel asertif, yakni deklaratif, demonstratif, koersif, dan penggunaan kekuatan (Chubb, 2021). Chubb pun memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas asertif Tiongkok di Laut China Selatan berdasarkan data empiris yang dijabarkan pada penelitiannya.

Dengan demikian, melihat pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan mencoba untuk melihat penyebab Tiongkok berperilaku agresif di Laut China Selatan berdasarkan persepsi Pemerintah Tiongkok, militer, masyarakat Tiongkok, dan faktor geografis. Selain itu, penggunaan variabel agresif sebagai perilaku Tiongkok pada penelitian skripsi kali ini akan berbeda dengan

penelitian-penelitian sebelumnya sebab terdapat pendefinisian tersendiri untuk variabel tersebut di dalam skripsi ini. Di samping itu, Teori Strategis yang digunakan pada penelitian kali ini yang berusaha untuk melihat tujuan serta instrumen yang digunakan oleh Tiongkok dalam rangka melancarkan strateginya melalui perilaku agresif di Laut China Selatan, di mana masih terdapat hal yang belum dianalisis pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

B. Sekuritisasi Negara-negara Asia Tenggara Pengklaim Laut China Selatan

Penelitian-penelitian yang membahas mengenai terjadinya sekuritisasi atas sengketa di Laut China Selatan yang terjadi di antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara pengklaim Laut China Selatan memperlihatkan terjadinya beberapa hal sekuritisasi pada beberapa negara. Secara umum, hal tersebut disebutkan terjadi disebabkan dari perilaku Tiongkok yang memperlihatkan kekuatan dominan mereka melalui pendekatan militer maupun nonmiliter di Laut China Selatan. Selain itu, beberapa bentuk sekuritisasi yang diperlihatkan dari hasil penelitian sebelumnya cenderung terbatas pada bentuk sekuritisasi keamanan. Dengan demikian, hal tersebut memperlihatkan terdapat sebuah dampak keamanan yang terjadi bagi negara-negara Asia Tenggara pengklaim Laut China Selatan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut hanya memperlihatkan bahwa negara yang mengalami sekuritisasi keamanan itu hanya terjadi pada dua negara Asia Tenggara saja, yakni Vietnam dan Filipina. Dengan demikian, untuk melihat kebaruan dari penelitian skripsi ini penting untuk meninjau

penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang sekuritisasi yang terjadi di kawasan yang disebabkan dari perilaku Tiongkok di Laut China Selatan.

Salah satu studi yang membahas tentang terjadinya sekuritisasi yang dilakukan oleh negara Asia Tenggara pengklaim Laut China Selatan, yakni Vietnam dan Filipina dibahas oleh Carlyle A. Thayer (2011a) pada studi kasus tahun 2011. Thayer menjelaskan bahwa Tiongkok memperlihatkan perilaku tegas yang agresif untuk menekankan kedaulatannya di Laut China Selatan terhadap kapal eksplorasi minyak di perairan yang juga diklaim oleh Filipina dan Vietnam (Thayer, 2011a). Untuk melihat konflik yang terjadi antara Tiongkok dengan pengklaim tersebut, Thayer memperlihatkan insiden-insiden yang melibatkan ancaman-ancaman dari pihak Tiongkok melalui peringatan, manuver ancaman, serta mengumumkan akan melaksanakan latihan angkatan laut di wilayah Pasifik Barat (Thayer, 2011a). Hal tersebut menghasilkan respon keamanan berupa strategi pertahanan baru yang dilakukan oleh Filipina. Pemerintah Filipina saat itu melakukan upaya *Capability Upgrade Program* melalui alokasi dana sebanyak 1 juta USD untuk meningkatkan pertahanan mereka melalui pembelian *fast patrol boats*, *long-range maritime aircraft*, dan lain sebagainya (Thayer, 2011a, hal. 80–81). Sementara itu, Vietnam merespon perilaku Tiongkok dengan mengumumkan bahwa akan melakukan latihan menembak di perairan yang berada di dekat Pulau Hon Ong (Bac dikutip dalam Thayer, 2011a). Di samping itu, di dalam artikel ini dijelaskan juga bahwa sekuritisasi yang terjadi disebabkan dari *elite speech* atau pidato dari pihak pemerintah negara tersebut.

Sementara itu, sejalan dengan Thayer (2011a), Renato Cruz De Castro (2020) membahas di jurnal artikelnya bahwa pemerintahan Presiden Benigno Aquino III (menjabat pada tahun 2010-2016) dan Presiden Rodrigo Duterte (menjabat pada tahun 2016-sekarang) sama-sama menggunakan ASEAN sebagai wadah untuk mendorong masing-masing tujuan dari kebijakan luar negeri pemerintahan mereka (De Castro, 2020). Meskipun demikian, hal yang perlu diperhatikan untuk melihat sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Filipina pada saat itu di artikel ini adalah saat masa pemerintahan Presiden Aquino III. Pemerintahan Presiden Duterte kurang tepat menjadi pertimbangan sebab De Castro (2020) menjelaskan di dalam penelitiannya sebab kebijakan luar negeri pemerintahan Duterte dilakukan untuk menghasilkan hubungan baik antara Filipina-Tiongkok sebagai upaya untuk program pembangunan infrastruktur melalui program BRI (Belt and Road Initiative). Dengan demikian, hal yang akan ditinjau adalah masa pemerintahan Aquino III pada periode 2010-2016.

Respon pada sektor keamanan pemerintahan Aquino III pada saat itu dapat dilihat pada tahun 2014. De Castro (2020) menjelaskan bahwa pada 28 April 2014 Manila dan Beijing menandatangani Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA) yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Gazmin dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina Philip Goldberg. EDCA pada intinya menjadikan Filipina dan Amerika Serikat untuk saling meningkatkan dan memanfaatkan fasilitas pertahanan mereka yang ada di Filipina. Selain itu, perjanjian kerja sama tersebut menjadikan Filipina dan Amerika Serikat dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan individu maupun kolektif mereka (De Castro, 2020).

Perjanjian kerja sama tersebut tentunya dapat dilihat sebagai konsekuensi logis dari perilaku Tiongkok di Laut China Selatan terhadap Filipina. Hal tersebut dapat dilihat melalui insiden-insiden yang terjadi antara kapal-kapal asal Filipina dengan pihak Tiongkok yang terjadi antara tahun 2011 dan 2012 di Reed Bank dan Scarborough Shoal. Selain itu, penghalang di Scarborough Shoal dibuat oleh pihak Tiongkok melalui China Maritime Surveillance (CMSU) untuk menghalangi akses bagi Filipina serta kapal nelayan asal Tiongkok juga diberi perlindungan oleh kapal yang dikirimkan oleh Tiongkok di ZEE Filipina (De Castro, 2020). Oleh sebab itu, pernyataan De Castro (2020, hal. 342) yang menyatakan bahwa Filipina akan berpikiran bahwa serangan terhadap Filipina dapat secara otomatis memicu kehadiran pasukan Amerika Serikat menjadi sangat relevan atas penguatan kerja sama dari kedua belah pihak melalui EDCA di tahun 2014.

Selain itu, Zenel Garcia dan Thomas A. Breslin (2016) pada penelitiannya memperlihatkan keterlibatan Jepang dan Korea Selatan di kawasan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan bagi negara-negara Asia Tenggara yang bersengketa dengan Tiongkok di Laut China Selatan. Garcia dan Breslin (2016) menjelaskan bahwa negara-negara Asia Tenggara mengklaim Laut China Selatan mengambil langkah strategis guna mencapai kepentingan mereka masing-masing melalui bantuan dari Jepang dan Korea Selatan, yang mana hal tersebut terjadi disebabkan oleh modernisasi militer serta perilaku asertif yang telah dilakukan oleh Tiongkok. Akan tetapi, artikel ini menunjukkan pola yang cukup mirip dengan beberapa literatur sebelumnya tentang negara-negara yang juga melakukan respon keamanan atas perilaku Tiongkok tersebut.

Garcia dan Breslin dalam penelitiannya ini memperlihatkan bahwa sekuritisasi hanya terjadi pada tiga negara Asia Tenggara saja, yakni Vietnam, Filipina, dan Indonesia.

Dalam kasus ini, Jepang dan Korea Selatan masing-masing memiliki permasalahan keamanan dengan Tiongkok. Jepang sendiri memiliki sengketa dengan Tiongkok di Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Sementara itu, Korea Selatan yang juga merupakan negara tetangga dari Jepang dianggap menginginkan peran pada konteks keamanan yang lebih luas. Kedua hal tersebut pun pada akhirnya merambat kepada sengketa yang terjadi di Laut China Selatan antara Tiongkok dan negara-negara pengklaim (Garcia & Breslin, 2016). Oleh sebab itu, Garcia dan Breslin (2016) berpendapat bahwa Jepang dan Korea Selatan dapat menekan Tiongkok dengan mudah dengan cara memberikan fasilitas peningkatan kapasitas bagi negara-negara yang bersengketa dengan Tiongkok di Laut China Selatan; seperti perjanjian kerja sama untuk membeli kapal *coast guard*, pesawat tempur, serta perjanjian kerja sama pertahanan yang masing-masing dijalin dengan Vietnam dan Filipina. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sekuritisasi yang terjadi terhadap Jepang dan Korea Selatan (sebagai negara non-pengklaim) serta Vietnam dan Filipina (sebagai negara pengklaim) saling memberikan hubungan yang saling menguntungkan dalam ranah pertahanan dan keamanan untuk menekan perilaku Tiongkok di Laut China Selatan.

Di samping itu, cukup berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya yang fokus membahas mengenai respon keamanan yang berupa kerangka kerja sama keamanan maupun peningkatan kekuatan militer dari negara-negara pengklaim, Hongzhou Zhang dan Sam Bateman (2017) melihat sisi lain dari sekuritisasi yang terjadi antara Tiongkok

dengan negara pengklaim di Laut China Selatan. Di dalam penelitian mereka melihat bahwa kasus sengketa penangkapan ikan di Laut China Selatan telah disekuritisasi yang disebabkan oleh beberapa kebijakan milisi maritim dari negara-negara pengklaim (H. Zhang & Bateman, 2017). Penelitian mereka juga bertujuan untuk membahas tentang dampak dari potensi sekuritisasi tentang industri penangkapan ikan terhadap upaya manajemen sengketa Laut China Selatan dan tentang perikanan laut (H. Zhang & Bateman, 2017). Hal tersebut terjadi disebabkan dari faktor nelayan Tiongkok yang dianggap sebagai “*fishing militia*” di wilayah sengketa oleh media, literatur akademik, analis keamanan, serta pejabat politik dan militer (H. Zhang & Bateman, 2017). Penelitian tersebut pun menyatakan bahwa pada saat isu tentang perikanan dipolitisasi dan disekuritisasi maka kerja sama di kawasan terkait dengan penangkapan ikan di Laut China Selatan akan semakin sulit.

Sementara itu, Arief Bakhtiar Darmawan dan Lady Mahendra (2018) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa negara-negara ASEAN terbelah dalam merespon Tiongkok. Di dalam penelitian tersebut memperlihatkan bahwa bagaimana masing-masing negara ASEAN memiliki pola perilaku yang dipengaruhi latar belakang historis atas sikap mereka terhadap Tiongkok. Darmawan dan Mahendra (2018) menggunakan Realisme Struktural untuk menganalisis fenomena ini dengan memperlihatkan bahwa terjadi sebuah strategi perimbangan kekuatan serta pemihakan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN.

Melalui penelitian tersebut juga dapat dilihat bahwa empat negara ASEAN yang menjadi pengklaim atas Laut China Selatan, yakni Filipina, Vietnam, Malaysia, dan

Brunei memiliki respon yang berbeda. Filipina dan Vietnam dianggap melakukan strategi perimbangan terhadap Tiongkok, di mana hal tersebut diperlihatkan melalui kerja sama antara Filipina dan Amerika Serikat dalam ranah peningkatan militer serta tindakan militer tegas yang dilakukan oleh Vietnam di wilayah sengketa mereka di Laut China Selatan sejak tahun 1999 (Darmawan & Mahendra, 2018). Sementara itu, Malaysia dan Brunei disebutkan mengambil strategi jalan tengah atau *middle path* sebab kedua negara ini memiliki hubungan bilateral yang erat dengan Tiongkok sehingga tidak melakukan kebijakan yang konfrontatif (Darmawan & Mahendra, 2018). Dengan demikian, melalui penelitian tersebut juga dapat dilihat bahwa hubungan masing-masing negara pengklaim Laut China Selatan dengan Tiongkok memiliki pengaruh besar terhadap perilaku yang dapat menghasilkan bentuk kebijakan yang tegas maupun cenderung halus kepada Tiongkok.

Oleh sebab itu, penelitian skripsi kali ini akan mencoba untuk melihat beberapa hal yang belum dibahas oleh penelitian-penelitian terdahulu tersebut maupun perbedaan tahun penelitian sehingga terdapat hal-hal baru yang dapat dieksplorasi lebih terkini. Hal tersebut antara lain adalah *elite speech* atau retorika dari pemimpin negara-negara Asia Tenggara pengklaim Laut China Selatan, bentuk kebijakan pada sektor keamanan negara-negara pengklaim, serta tujuan dari agenda sekuritisasi terhadap perilaku Tiongkok di Laut China Selatan. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus kepada ranah tersebut dengan menggunakan Teori Sekuritisasi untuk melihat fenomena yang terjadi pada studi kasus ini.